

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KREDIT PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK CABANG HARMONI

Dinie Kharisma Putri¹ dan Setiadi²

¹Mahasiswa dan ²Dosen Prodi Akuntansi Unsurja

¹ diniekharismaputri01@gmail.com dan ² tedi.hartoko@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern terhadap kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Harmoni berdasarkan dengan unsur pengendalian intern menurut COSO dan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Harmoni. Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dan tindakan secara langsung akan digunakan sebagai sumber primer, sedangkan catatan tertulis dan dokumentasi dilapangan digunakan sebagai sumber sekunder.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Harmoni sudah berjalan dengan baik. Namun terdapat ketidaksesuaian pada aktivitas pengendalian pada bagian yang masih memerlukan perhatian, diantaranya masih kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh manajemen puncak terhadap karyawan dalam proses pencairan kredit dan penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai latar belakang pendidikan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kredit

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dimana Bank memiliki beberapa fungsi, salah satunya *agent of trust*. *Agent of trust* berarti dalam kegiatan usahanya Bank mengandalkan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Masyarakat percaya uangnya tidak akan disalah gunakan oleh Bank, akan dikelola dengan baik dan Bank tidak akan bangkrut. Melalui kelebihan dana tersebut Bank dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam bentuk kredit.

Aktivitas perbankan yang utama yaitu kegiatan funding atau menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, giro dan lainnya. Kegiatan kedua yang dilakukan oleh Bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usaha atau sering disebut pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah. Semakin besar tingkat penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka semakin besar pula jumlah investasi yang dimiliki perusahaan.

Adanya penjualan kredit yang dilakukan, dapat mengurangi kemungkinan resiko seperti biaya penambahan pegawai dan pengurusan administrasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5 C, yaitu character, capacity, capital, collateral and condition hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya dalam mencegah adanya kredit macet.

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usahatidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan berdampak buruk bagi debitur maupun kreditur. Dari segi kreditur (Bank) kredit macet akan menyebabkan ketidaklancaran dalam perputaran kas yang menyebabkan kerugian pada pihak Bank karena keterbatasan dana yang dimiliki sehingga tidak mampu menyalurkan dana untuk debitur lainnya dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu akan berdampak terhadap penurunan keuntungan yang diperoleh pihak Bank.

Kegiatan perkreditan selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan dikarenakan kegiatan perkreditan merupakan kegiatan menyalurkan dana masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sistem pengendalian internal yang baik. Menurut Hery, (2018: 39) pengendalian intern merupakan bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas kredit, baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas (termasuk masalah otorisasi persetujuan kredit), sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang akurat. Dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik maka pihak Bank mampu meminimalisir dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan kepentingan serta mampu memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menanggulangi kredit macet.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) adalah bank umum milik negara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai *Agent Of Trust* yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dananya dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain. Berikut tabel data total kredit yang diberikan dan total kredit macet pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Harmoni sebagai berikut:

Data Kredit Yang Diberikan dan Total Kredit Macet

Tahun	Total Kredit Yang Diberikan	Total Kredit Macet	Presentase Piutang Tak Tertagih
2021	51.875.975.059	11.296.622.800	22%
2020	46.580.287.880	11.000.458.457	24%
2019	49.469.520.760	14.014.387.910	28%

Sumber: PT Bank Negara Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Harmoni serta untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Harmoni sudah sesuai dengan COSO.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 1 ayat 2) tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan menurut (Selamet, 2017:50) Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang tugas utamanya meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat diantaranya dalam pemberian kredit serta memberikan pelayanan jasa-jasa perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya..

Sistem Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* yang dikutip dalam Sujarweni, (2019: 70) pengendalian intern adalah proses yang dapat dipengaruhi direksi, manajemen, dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkan efisiensinya dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Sedangkan menurut Hery, (2018: 39) pengendalian intern merupakan bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas kredit, baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas (termasuk masalah otorisasi persetujuan kredit), sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang akurat.

Kredit

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998 pada dasarnya “kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Sedangkan menurut Dyanasari, (2018:

15) “kredit merupakan semua jenis pinjaman uang maupun barang yang sifatnya wajib dibayarkan kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi bunga kredit dalam setiap kredit yang dilakukan pihak peminjam”

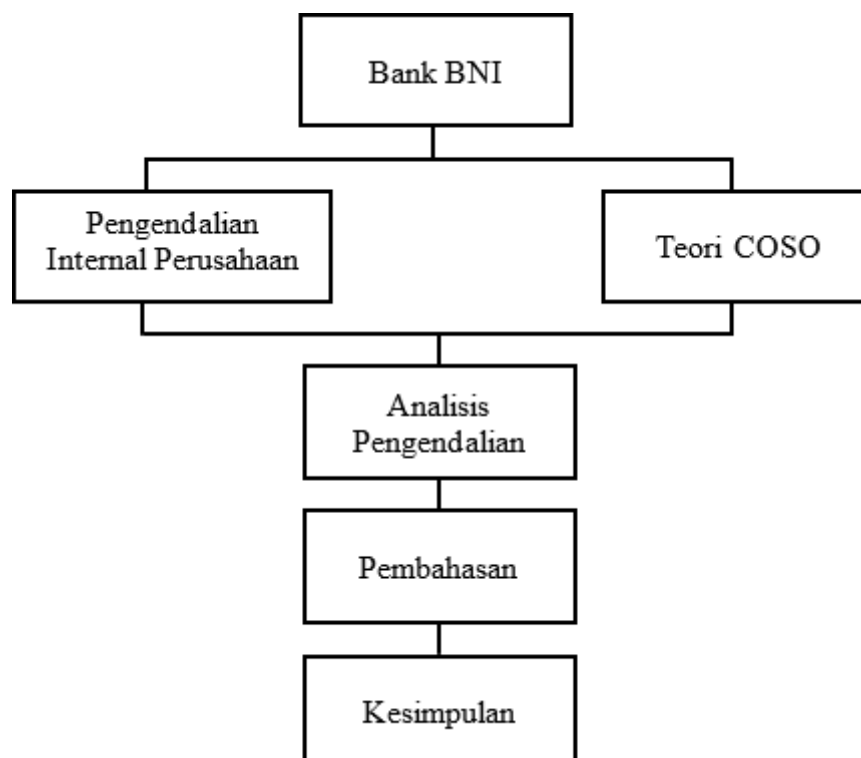
Kredit Macet

Menurut Rivai, (2018: 146) Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Sedangkan menurut Kasmir, (2019: 106) kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem pengendalian intern pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Harmoni dan pengendalian COSO secara sistematis. Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel bebas mandiri untuk menjelaskan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan Pengendalian Intern.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini menganalisis perbandingan antara sistem pengendalian intern pada PT. Bank Negara Indonesia dan sistem pengendalian intern menurut COSO yang ditinjau berdasarkan lima aspek yaitu; Lingkungan Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Penaksiran Risiko, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan. Selanjutnya kelima aspek tersebut sebagai tolak ukur sekaligus pembahasan dari terpenuhi atau tidaknya tujuan sistem pengendalian intern pada PT. Bank Negara Indonesia yang kemudian akan mendapatkan kesimpulannya

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Harmoni yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa perbankan terkemuka di Indonesia. Waktu penelitian ini berproses dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono, (2018: 35) menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan lebih identik dengan sifat atau karakteristik alih-alih variabel angka. Hal ini menyebabkan data ini tidak dapat diukur dan dihitung dengan pasti. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dalam bentuk kuesioner

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil observasi langsung dan wawancara pihak terkait pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Harmoni yaitu dalam bentuk kuesioner. Sedangkan Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa sejarah perusahaan, sistem pengolahan kredit, bagan struktur dan data kredit macet pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Harmoni periode tahun 2019-2021 yaitu dalam bentuk dokumen resmi perusahaan.

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2018: 38) definisi variabel penelitian yaitu segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, lalu ditarik kesimpulannya. Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan Pengendalian Intern..

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode

observasi dan metode dokumentasi dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik wawancara, yaitu dengan memberikan pernyataan tentang pelaksanaan dan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi. Pada penelitian ini sumber yang diwawancara ialah Bapak Imam Pujiarto sebagai penyelia kredit, Ibu Eva Supriyanti sebagai marketing, Ibu Nurul Maisarah sebagai Audit, Ibu Nunik Hermawati sebagai Analisis Kredit. Sedangkan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dan penggandaan data sekunder seperti dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan seperti, prosedur pemberian kredit, dan perkembangan kredit bermasalah dan dokumen pendukung lainnya

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode dengan analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, lalu kemudian interpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

Bentuk analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada tahap ini peneliti mewawancarai pihak terkait pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Harmoni untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Tabulasi

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari sumber terkait selanjutnya peneliti mengelompokkan atau menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari kuesioner yang diberikan.

3. Analisis

Setelah menyusun data yang diperoleh selanjutnya peneliti melakukan analisis perbandingan terkait data yang diperoleh dari Bank BNI dengan standar COSO.

4. Pembahasan

Setelah melakukan analisis selanjutnya peneliti menafsirkan hasil dari pengelolah yang diperoleh.

5. Kesimpulan

Lalu peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal Pada PT BNI Cabang Harmoni

1. Lingkungan Pengendalian

- Tindakan Manajemen Puncak Pengendalian Internal
 - I. Pihak manajemen sudah menerapkan sistem pengendalian intern atas penyaluran kredit yang dimana sudah terdapat pengendalian di mulai dari debitur mengumpulkan persyaratan, pengecekan identitas, analisis dokumen, kunjungan ke debitur, akad, pencairan dana.
 - II. Jika ada karyawan yang tidak melakukan tindakan yang benar sesuai dengan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang diterapkan dalam perusahaan, tindakan yang diambil oleh manajemen puncak BNI tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Apabila terdapat karyawan yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang digunakan dalam perusahaan, maka tindakan yang diambil oleh manajemen puncak akan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tersebut.
- Kebijakan Manajemen Puncak Pengendalian Internal
 - I. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh manajemen puncak BNI dalam rangka pengendalian internal terhadap pemberian kredit antaralain seperti pembagian tugas dan tanggung jawab, proses verifikasi dan validasi data yang terarah, sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dan sistem pelaporan yang transparan.
 - II. Manajemen puncak melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait persyaratan pemberian kredit. Dengan melakukan evaluasi ini, manajemen puncak dapat memastikan bahwa kebijakan pemberian kredit perusahaan telah diimplementasikan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membantu mengurangi risiko kredit yang mungkin ditanggung oleh perusahaan.
- Prosedur Manajemen Puncak Pengendalian Internal
 - I. Dalam pemberian kredit pihak BNI akan melakukan mengecek data diri debitur dan BI checking lalu akan menganalisis persyaratan debitur yang dibutuhkan BNI seperti KTP, NPWP, Anggunan, slip gaji dan lain-lain tergantung jenis kredit yang dilakukan.
 - II. Manajemen puncak akan melakukan prosedur sesuai dengan kebijakan perusahaan, jika terjadi pelanggaran pertama maka

manajemen puncak akan memberikan peringatan dengan pemberian surat peringatan pertama, namun apabila masih terjadi pelanggaran yang dilakukan maka manajemen puncak akan memberikan surat peringatan kedua sekaligus dilakukan mutasi, apabila terjadi lagi pelanggaran maka manajemen puncak akan melakukan PHK. Prosedur yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan karyawan yaitu melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pelanggaran yang dilakukan lalu melakukan evaluasi tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan, setelah itu melakukan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seperti teguran tertulis, sanksi administrasi, mutasi wilayah dll.

2. Penafsiran Risiko

- Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
 - I. Penyusunan laporan keuangan kredit pada BNI dilakukan dengan menggunakan sistem, dimana pelaporan yang dilakukan hanya menginput jumlah penyaluran kredit dan jumlah kredit yang mengalami kemacetan sedangkan untuk wewenang dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh kantor BNI pusat. Sistem penyusunan laporan keuangan kredit BNI Harmoni dilakukan dengan cara menginput jumlah nominal kredit dan jumlah nominal kredit macet ke dalam sistem yang nanti akan diproses oleh bagian akuntan BNI pusat.
 - II. Pada BNI Harmoni untuk bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan kredit ke dalam sistem dilakukan oleh bagian collection yaitu bagian khusus untuk bagian kredit macet. Pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan ke dalam sistem adalah bagian collection.
- Penyusunan laporan keuangan yang transparan
 - I. Penyusunan laporan keuangan kredit harus dilakukan secara transparan. Transparansi dalam penyusunan laporan keuangan kredit penting untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan menghindari terjadinya manipulasi atau penyelewengan data keuangan.
 - II. BNI selalu melaporkan laporan keuangannya ke dalam Bursa Efek Indonesia agar dapat di evaluasi secara publik sehingga

memungkinkan pihak yang berkepentingan, seperti investor dan regulator, untuk memahami dengan jelas kondisi keuangan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Laporan keuangan BNI bisa dievaluasi secara transparan dengan cara mengakses laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia.

- Penyusunan laporan keuangan yang berkelanjutan

I. BNI Harmoni harus melakukan penyajian laporan keuangan berkelanjutan yang dilakukan dengan melalui sistem oleh kantor BNI pusat.

3. Aktivitas Pengendalian

- Pemisahan tugas

- I. Pemisahan tugas yang efektif dapat membantu meminimalkan risiko kecurangan dan kekeliruan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat sistem pengendalian internal dalam bagian kredit.
- II. Dalam pemisahan tugas dalam bagian kredit yang pada dilakukan oleh pihak SDM dengan persetujuan pemimpin bagian serta mengetahui dari pihak Direksi.
- III. Dalam BNI tidak ada dibutuhkan kualifikasi khusus, syarat utama dalam penempatan tugas di bagian kredit yaitu harus melewati tahap PKWT terlebih dahulu, yang mana untuk syarat untuk menjadi PKWT yaitu harus memiliki latar pendidikan D3/S1 dari semua jurusan

- Otorisasi yang tepat atas transaksi

- I. Otorisasi yang dilakukan adalah persetujuan penyaluran kredit yang berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Otorisasi dalam melaksanakan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang diberikan wewenang.
- II. Tim kredit bertanggung jawab penuh atas proses otorisasi kredit, termasuk mengevaluasi kelayakan kredit, menentukan jumlah kredit yang dapat disetujui, menetapkan suku bunga dan jangka waktu kredit, serta melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kredit yang disalurkan.

- Dokumen dan catatan yang memadai

- I. Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa dokumen dan catatan yang perlu dilaporkan dan diarsipkan secara teratur untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit dapat terlaksana

dengan baik dan transparan maka diperlukan beberapa bentuk laporan dokumen dan catatan seperti formulir aplikasi kredit, dokumen jaminan, data diri dan persyaratan pendukung lainnya.

- II. Jika terdapat kekurangan pada dokumen yang diserahkan oleh debitur, maka proses pencairan akan ditunda hingga semua dokumen yang diperlukan telah terpenuhi.
 - III. Dalam pemberian kredit, tugas memeriksa dan memberikan persetujuan mengenai dokumen dan catatan biasanya dilakukan oleh team analisis kredit. Yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan persetujuan mengenai dokumen dan catatan adalah team analisis kredit.
- Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
 - I. Ada beberapa beberapa tindakan pengendalian fisik yang dilakukan dalam pemberian kredit seperti penguncian dokumen kredit, pelacakan dokumen kredit, pengamanan data kredit dan pemeriksaan fisik atas jaminan. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatan yang berlaku dalam pemberian kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pengamanan data kredit, pemeriksaan fisik atas jaminan
 - II. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keandalan aktiva dan pencatatan perusahaan, sedangkan staf pengendalian intern bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pengendalian yang diterapkan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan Tanggung jawab atas pengendalian fisik dan pencatatan yang berlaku dalam pemberian kredit biasanya terletak pada tim analisis kredit. Selain itu, setiap karyawan yang terlibat dalam proses pemberian kredit dan pencatatan transaksi juga bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh tim manajemen risiko dan kepatuhan, serta melaporkan segala kejadian atau kecurangan yang terdeteksi kepada atasan atau pihak yang berwenang.
 - Pengendalian independen atau verifikasi internal
 - I. Ada beberapa proses verifikasi internal yang dilakukan dalam pemberian kredit yaitu mengumpulkan informasi data pribadi

debitur, melakukan analisis kelayakan kredit, melakukan verifikasi informasi debitur, evaluasi risiko kredit dan keputusan pemberian kredit. Dalam proses verifikasi internal yang dilakukan dalam pemberian kredit biasanya melibatkan beberapa tahapan seperti mengumpulkan informasi data pribadi debitur, melakukan analisis kelayakan kredit, melakukan verifikasi informasi debitur, evaluasi risiko kredit dan keputusan pemberian kredit.

- II. Yang bertanggung jawab dalam proses melakukan verifikasi terhadap calon debitur yaitu team analisis kredit dengan melakukan verifikasi informasi pribadi dan keuangan debitur, memeriksa dokumen pendukung lainnya. Verifikasi terhadap pemberian kredit merupakan tanggung jawab dari team analisis kredit

4. Informasi dan Komunikasi

- Pencatatan

- I. pencatatan yang akurat dan teratur sangat penting dalam pemberian kredit, karena dapat memastikan bahwa informasi yang terkait dengan kredit tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan ada beberapa hal yang harus dicatat dalam proses pemberian kredit seperti identitas diri, jenis kredit, besar kredit, jangka waktu kredit, dan angsuran. Pencatatan yang dilakukan dalam pemberian kredit meliputi pencatatan dokumen dan transaksi yang terkait dengan kredit seperti dokumen kredit, sistem informasi kredit, jurnal transaksi, catatan akuntansi dan laporan keuangan.
- II. Yang bertanggung jawab dalam proses pencatatan pemberian kredit merupakan team admin kredit. Tugas admin kredit sebagai mencatat dan menyusun informasi mengenai pemberian kredit yang dilakukan oleh tim atau unit kredit.

- Proses

- I. Pihak BNI menginformasikan proses yang akan dilalui mengenai pemberian kredit kepada nasabah seperti pencairan dana yang akan dilakukan setelah 30 sampai 45 hari kerja setelah permintaan kredit disetujui, jumlah kredit yang bisa didapatkan, tingkat bunga maupun pembatalan pemberian kredit jika dokumen yang diserahkan tidak memenuhi syarat seperti izin usaha bukan milik sendiri dan histori kredit buruk.
- II. semua divisi kredit bertanggung jawab selama proses pemberian

kredit.

- Pelaporan
 - I. Pelaporan yang dilakukan dalam pemberian kredit bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai portofolio kredit dan risiko kredit kepada manajemen, regulator, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
 - II. Dalam pemberian kredit, data yang diperoleh dari debitur harus diverifikasi dengan teliti dan diuji keabsahannya sebelum digunakan untuk membuat keputusan kredit dan pelaporan. Selain itu, data dan informasi yang diperoleh juga harus selalu diperbarui secara berkala dan diuji keakuratannya.

5. Pemantauan

- Pemantauan secara periodik
 - I. Pemantauan dilakukan secara terjadwal, audit dapat dilakukan pada 6 bulan sekali sesuai dengan jadwal audit yang telah ditetapkan. Sedangkan secara tidak terjadwal, audit dapat dilakukan ketika terjadi kejadian yang mengindikasikan adanya masalah atau ketika terdapat kecurigaan adanya pelanggaran.
 - II. Dalam otoritas yang bertanggung jawab dalam memantau aktivitas operasional perusahaan adalah dari Audit Internal Perusahaan. Otoritas yang bertanggung jawab memantau dalam proses pemberian kredit adalah audit internal perusahaan.
 - III. Biasanya yang sering terjadi dalam pengawasan yang dilakukan oleh audit internal yaitu adanya pencairan dana kredit namun kelengkapan dokumen administrasi belum terpenuhi.
- Pemantauan mutu pengendalian internal
 - I. Audit internal berperan dalam memantau mutu pengendalian internal dengan melakukan penilaian independen atas sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pemantauan mutu biasanya dilakukan oleh manajemen puncak, namun tugas ini pun dapat dilakukan oleh audit internal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh manajemen.
 - II. faktor yang menjadi hambatan dalam menjaga mutu pengendalian internal yaitu target dari pemberian kredit yang ditetapkan oleh perusahaan serta kurangnya pelatihan terkait kompetensi karyawan. Beberapa aspek yang dapat menjadi hambatan dalam menjaga mutu

pengendalian internal dalam BNI Harmoni yaitu adanya target dari pemberian kredit yang ditetapkan sehingga karyawan dituntut untuk mengejar target dengan cara apapun.

- III. Pemantau tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap pegawai yang melanggar aturan atau kebijakan perusahaan. Kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman biasanya berada di tangan manajemen perusahaan atau organisasi, atau departemen sumber daya manusia.

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal COSO pada Sistem Pengendalian Intern Pada PT BNI Cabang Harmoni

Pengendalian internal COSO	Penjelasan <i>Description</i>	Penerapan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	Tindakan Manajemen Puncak Pengendalian Internal	Pihak manajemen sudah menerapkan sistem pengendalian intern atas penyaluran kredit. Jika tindakan karyawan tidak sesuai dengan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang digunakan dalam perusahaan, manajemen puncak akan mengambil tindakan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tersebut.	Sesuai
	Kebijakan Manajemen Puncak Pengendalian Internal	Kebijakan manajemen puncak dalam rangka pengendalian internal terhadap pemberian sudah dilakukan. Manajemen puncak juga melakukan evaluasi memastikan bahwa kebijakan pemberian kredit perusahaan telah diimplementasikan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sesuai
	Prosedur Manajemen Puncak Pengendalian Internal	Manajemen puncak sudah melakukan prosedur dalam pemberian kredit sesuai kebijakan perusahaan. Jika terjadi pelanggaran, manajemen puncak akan mengambil tindakan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan.	Sesuai
Penilaian resiko	Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi	Sistem penyusunan laporan keuangan kredit BNI Harmoni dilakukan dengan cara menginput data ke dalam sistem, yang nantinya akan diproses oleh bagian akuntan BNI pusat.	Sesuai
	Penyusunan laporan keuangan yang transparan	Penyusunan laporan keuangan kredit dilakukan secara transparan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan menghindari terjadinya manipulasi atau penyelewengan data keuangan. BNI selalu melaporkan laporan keuangannya ke dalam Bursa Efek	Sesuai

		Indonesia agar dapat di evaluasi secara publik	
	Penyusunan laporan keuangan yang berkelanjutan	BNI Harmoni melakukan penyajian laporan keuangan berkelanjutan yang dilakukan dengan melalui sistem oleh kantor BNI pusat.	Sesuai
Aktivitas pengendalian	Pemisahan tugas	Pemisahan tugas pada BNI Harmoni terdapat ketidaksesuaian antara posisi yang ditempatkan dengan latar belakang pendidikan yang seharusnya.	Kurang Sesuai
	Otorisasi yang tepat atas transaksi	Otorisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.	Sesuai
	Dokumen dan catatan yang memadai	Dokumen dan catatan dilaporkan dan diarsipkan secara teratur	Kurang Sesuai
	Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan	Tindakan pengendalian fisik yang dilakukan dalam pemberian kredit seperti penguncian dokumen kredit, pelacakan dokumen kredit, pengamanan data kredit dan pemeriksaan fisik atas jaminan.	Sesuai
	Pengendalian independen atau verifikasi internal	Proses verifikasi internal yang dilakukan dalam pemberian kredit seperti mengumpulkan informasi data pribadi debitur, melakukan analisis kelayakan kredit, melakukan verifikasi informasi debitur, evaluasi risiko kredit dan keputusan pemberian kredit.	Sesuai
Informasi dan Komunikasi	Pencatatan	Pencatatan pemberian kredit, serta menyusun dan memberi informasi terkait pemberian kredit yang dilakukan kepada nasabah maupun team yang terkait dalam proses pemberian kredit dilakukan dengan teratur	Sesuai
	Proses	Pihak BNI menginformasikan proses yang dilalui mengenai pemberian kredit kepada nasabah.	Sesuai
	Pelaporan	Pelaporan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai portofolio kredit dan risiko kredit kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pemberian kredit, data yang diperoleh dari debitur harus diverifikasi dengan teliti dan diuji keabsahannya sebelum digunakan untuk membuat keputusan kredit dan pelaporan	Sesuai
Pemantauan	Pemantauan secara periodik	Proses pemantauan dilakukan oleh audit dan penyelia kredit dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal.	Sesuai
	Pemantauan mutu pengendalian internal	Pemantauan mutu pengendalian internal dilakukan oleh audit internal maupun pihak ketiga yang ditunjuk/diberi wewenang oleh pihak manajemen	Sesuai

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan dengan

judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Kredit Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Harmoni” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Harmoni sebagian besar telah diterapkan dan dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif karena di temukan penyimpangan dari hasil wawancara yang dilakukan seperti pemisahan tugas antara petugas yang melakukan pengikatan kredit belum sesuai pada penempatan serta dokumen dan catatan yang belum memadai namun sudah dilakukan pencairan kredit.
2. Sistem pengendalian intern pada sistem pemberian kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Harmoni sebagian besar dalam komponen pengendalian intern menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi & komunikasi dan pemantauan sudah sesuai penerapannya, namun pada komponen Aktivitas Pengendalian dengan indikator pemisahaan tugas dan dokumen & catatan yang memadai masih belum sesuai dengan kebijakan menurutCOSO.

DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2020). *Modern Auditing*. (Y. Sumiharti, Ed.) (Ketujuh). Jakarta: Erlangga.
- Djaali. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dyanasari. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain/oleh Wahyunindyawati danDyanasari*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartadi, B. (2018). *Sistem Pengendalian Internal (Revisi)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hery. (2018). *Akuntansi Aset, Liabilitas dan Ekuitas* (4 ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- Kasmir. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Keenam). Jakarta: SalembaEmpat.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V. (2018). *Bank and Financial Institution Management: Conventional and ShariaSystem*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Selamet, R. (2017). *Manajemen Perbankan Indonesia Teori, Praktek dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasaar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Syafril. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Kencana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 1 ayat 2). (n.d.).